

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Tahapan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Secara berjenjang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa, Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Dokumen RPJPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2006-2026 menjadi panduan dalam penyusunan RPJMD bagi Kepala Daerah terpilih 2013-2018 yang dijabarkan dalam Visi-Misi dan Program Prioritas serta Rancangan Rencana Teknokratik.

Kegiatan Pembangunan Daerah pada dasarnya mempunyai tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, maka kebijakan dan program pembangunan yang ada di Kabupaten Pamekasan harus terintegrasi dengan Kebijakan Pembangunan Nasional maupun Propinsi sehingga mampu menjamin kesesuaian pembangunan antar daerah wilayah maupun lintas sektor.

Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendapatan Daerah, pada Badan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan daerah, melalui upaya-upaya penggalan potensi sumber-sumber daya yang ada di Kabupaten Pamekasan.

Rencana Strategis Badan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Kabupaten Pamekasan harus mampu menginterpretasikan semua perencanaan dan program pembangunan sebagaimana tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya.

1.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Renstra Badan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Tahun 2013-2018 ini didasarkan pada beberapa peraturan dan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 08 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya;
12. Keputusan Bupati No. 30 Tahun 2013, tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan nomor 11 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 56 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Badan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 adalah untuk merumuskan program kegiatan jangka menengah, menganalisa dan menjabarkan ke dalam potensi penerimaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah selama lima tahun ke depan (2013 - 2018). Adapun tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah :

1. Menjabarkan visi, misi dan program kegiatan prioritas Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan.
2. Memberikan arah yang jelas dalam menentukan masing-masing KUA-PPAS, RKPD, Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : Gambaran Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPKA
- 2.2 Sumber Daya BPKA
- 2.3 Kinerja Pelayanan BPKA
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKA

Bab III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKA
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKA

4.3 Strategi dan Kebijakan

Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Bab VI: Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab VII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BPKA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPKA

Lingkup tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset sebagai berikut :

1. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, pengelolaan dan pengendalian di bidang penganggaran, perbendaharaan, pengelolaan asset, akuntansi serta pelaporan keuangan dan asset daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. melaksanakan fungsi dan wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- c. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- d. menyusun rencana APBD dan rencana perubahan APBD;
- e. menyusun laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
- f. mengkoordinasikan penyusunan proyeksi keuangan daerah untuk pagu pendapatan dan belanja daerah;
- g. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang / Asset Daerah;
- h. menyusun dan mengelola Piutang dan Utang Daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administratif dan fungsional,

menyelenggarakan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan asset serta hubungan kemasyarakatan dan kearsipan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program keda dan rencana kegiatan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas administrasi umum, ketatausahaan dan surat menyurat ;
- d. pengelolaan kepegawaian, hubungan masyarakat dan asset serta kearsipan;
- e. pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan;
- f. penyusunan bahan dalam rangka pembinaan dan peningkatan kemampuan SDM.

3. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan teknis operasional penyusunan dan pengendalian anggaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TAPBD).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan pedoman umum penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. pelaksanaan pengendalian anggaran kegiatan SKPD;
- d. penyiapan penetapan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksananan Perubahan Anggaran (DPA/DPPA) SKPD;
- e. penyiapan penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD) SKPD;
- f. pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;

- g. pengkajian sumber pembiayaan dan pemanfaatan surplus / defisit pembiayaan;
- h. pengelolaan utang, piutang dan investasi daerah;
- i. pemantauan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- j. penyiapan anggaran kas daerah.

4. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dalam rangka pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional penyelenggaraan perbendaharaan daerah;
- b. penyelenggaraan perbendaharaan belanja dan pembiayaan;
- c. penyelenggaraan pembinaan terhadap Bendahara Pengeluaran;
- d. penyimpanan dan penempatan Uang Daerah;
- e. penelitian kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) yang diizinkan oleh Pengguna Anggaran;
- f. penyiapan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

5 . Bidang Asset Daerah

Bidang Asset Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengadaan, pengelolaan, penghapusan dan mutasi asset daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Asset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan pedoman umum pengelolaan asset daerah;
- b. pengkoordinasian dan pembinaan terhadap Bendahara yang menangani asset pada SKPD;
- c. menyiapkan Pejabat yang bertugas mengelola Asset Daerah untuk ditetapkan oleh Bupati;
- d. menyimpan bukti asli kepemilikan asset daerah;
- e. melaksanakan analisis kebutuhan dan sensus asset daerah;

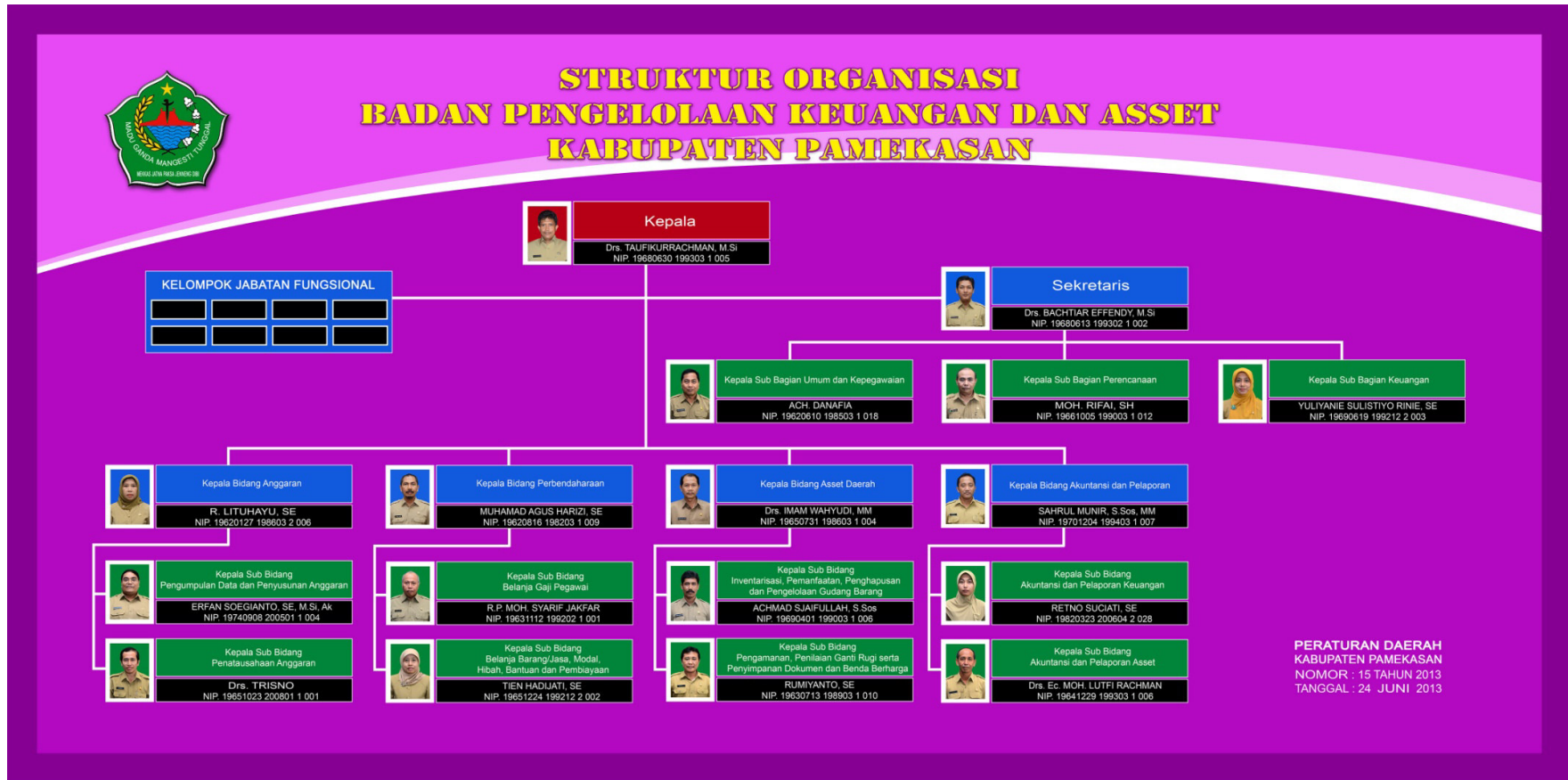
- f. melaksanakan fungsi pengelolaan asset daerah;
 - g. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi asset daerah;
 - h. melakukan pembinaan atas pengelolaan asset daerah pada SKPD;
 - i. mengamankan asset dan tuntutan ganti rugi;
 - j. menyusun standar harga dan satuan barang non konstruksi.
6. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
- Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, utang piutang dan ekuitas dana termasuk perhitungannya dalam rangka penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional penyelenggaraan akuntansi daerah;
 - b. penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Arus Kas dan Catatan Atas laporan Keuangan;
 - d. penyelenggaraan evaluasi laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah;
 - e. pembinaan terhadap Petugas Akuntansi pada SKPD.

STRUKTUR ORGANISASI

Untuk dapat menjalankan tugas yang dibebankan, Badan Daerah Kabupaten Pamekasan memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
 - Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 - Kasubbag Keuangan
 - Kasubbag Perencanaan
3. Kepala Bidang Anggaran
 - Kasubid Pengumpulan Data dan Penyusunan Anggaran
 - Kasubid Penatausahaan Anggaran
4. Kepala Bidang Perbendaharaan
 - Kasubid Belanja Gaji Pegawai
 - Kasubid Belanja Barang / Jasa, Modal, Hibah, Bantuan dan Pembiayaan
5. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
 - Kasubid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
 - Kasubid Akuntansi dan Pelaporan Asset
6. Kepala Bidang Asset Daerah
 - Kasubid Inventarisasi, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pengelolaan Gudang
 - Kasubid Pengamanan, Penilaian Ganti Rugi serta Penyimpanan Dokumen dan Barang Berharga.

Jumlah personil yang ada sebanyak 42 orang terdiri : 39 orang PNS dan tenaga honorer 3 orang.



Sistem, Prosedur dan Mekanisme Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Sistem Prosedur dan Mekanisme Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mengacu pada :

- a. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Berikut mekanisme kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan asset daerah sebagai SKPD:

- Menyusun rencana kerja dan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah tahun berikutnya;
- Menyusun laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset;
- Menyusun laporan inventaris barang Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset;
- Penyusunan APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan;

Berikut mekanisme kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan asset daerah sebagai PPKD:

- Penyusunan APBD sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah;
- Penyampaian rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikut sejalan dengan RKPD sebagai landasan RAPBD kepada kepala daerah untuk diajukan kepada DPRD;

- Menjadwalkan pembicaraan pendahuluan tentang pembahasan KUA tahun anggaran berikutnya untuk diajukan kepada DPRD. Pembahasan prioritas dan flapon anggaran sementara berdasarkan KUA yang disepakati DPRD untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD;
- Menerima rencana kerja dan anggaran seluruh SKPD untuk bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun berikutnya;
- Mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD;
- Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk diajukan ke DPRD dan diaudit BPK RI ;
- Melakukan pengelolaan asset daerah meliputi, inventaris, penilaian, pemanfaatan, penghapusan, pengamanan dan ganti rugi asset.

2.2 Sumber Daya SKPD

Adapun sumber daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan sebagai berikut :

TABEL 2.2.1
JUMLAH PEGAWAI YANG MENDUDUKI JABATAN PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET KABUPATEN PAMEKASAN

No.	Nama Jabatan	Eselon	Jumlah
1	Kepala Dinas	II b	1
2	Sekretaris	III a	1
3	Kepala Bidang	III b	4
4	Kepala Bidang Subag / Seksi	IV a	11

Jumlah personil Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pamekasan sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) orang (Tabel 2.2.4 & Tabel 2.2.5).

TABEL 2.2.2
JUMLAH PEGAWAI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASSET KABUPATEN PAMEKASAN
 (Berdasarkan Tingkat Pendidikan)

No.	Jabatan	S2	S1	D1	SLTA	SLTP	SD
1	Kepala Dinas	1					
2	Sekretaris	1					
3	Kepala Bidang	2	2				
4	Kepala Subag / Seksi/Subbid	1	8		2		
5	Staf		4	4	13		
6	Honoror		1		2	1	

Disamping itu, untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan, perlu ditunjang adanya kelengkapan sarana dan prasarana yang ada. Antara lain :

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Keadaan			Keterangan
				Baik	Rusak	Rusak Berat	
1	Gedung Kantor	1	unit	V			
2	Mobil Dinas	3	unit	V			
3	Sepeda Motor	36	unit	V			

7	Kereta Kelinci	2	unit	V			
4	Komputer	47	Unit	V			
5	Laptop	12	Unit	V			
6	Mesin Tik	5	Unit	V			

2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

Berikut ini Tingkat capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset berdasarkan sasaran/target Renstra BPKA periode sebelumnya.

Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKA yang dilaksanakan melalui beberapa target indikator kinerja antara lain Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Program Peningkatan PAD dan Dana Perimbangan tercapai hampir 100%. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3.1, dimana target Anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan di BPKA dari tahun 2008 s/d. 2013 rata-rata realisasinya diatas 99% hampir mencapai 100%, kecuali untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA.ke n+1 dari tahun 2009 s/d 2013, tiap tahunnya realisasi hanya tercapai rata-rata 67,76%. Kegiatan tersebut tidak tercapai 100% disebabkan karena pelaksanaan kegiatan masih menunggu penetapan APBD oleh DPRD dan Gubernur yang biasanya baru terlaksana pada awal tahun berikutnya.

Adapun faktor pendukung pencapaian kinerja pelayanan BPKA dari tahun 2009 s/d. 2013 antara lain:

- a. SDM dan Kinerja aparatur yang baik;
- b. Tersedianya dana yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan;
- c. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur.

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan
dan Asset
Kabupaten Pamekasan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Peningkatan Kualitas Kinerja aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya																		

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN | 2014

2	Aparatur																	
		Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan	120	25,000,000.00	129,700,000.00	175,000,000.00	175,000,000.00	200.000.000,00	72,684,900.00	129,510,000.00	174,974,400.00	174,841,700.00	198.650.000,00	96.91	99.85	99.99	99.91	99.97
	Pengelolaan Keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan auditabel dengan opini wajar Tanpa Pengecua																	

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN | 2014

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-					
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah																			
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan KDH tentang		Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan	51	284,860,000.00	304,860,000.00	344,235,000.00	475,000,000.00	500,000,000.00	204,828,900.00	226,390,250.00	220,560,000.00	297,675,000.00	334.679.000,00	71.91	74.26	64.07	62.67	66,94	

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN | 2014

Penjabaran APBD TA. ke n+1	an Daerah dan Peraturan KDH yang tersusun																	
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan KDH tentang Perubahan APBD TA. Ke n	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan KDH yang tersusun	51	240,190,000.00	269,515,000.00	335,815,000.00	361,250,000.00	375.000.000,00	240,190,000.00	269,515,000.00	335,165,000.00	359,695,000.00	373.050.000,00	100.00	100.00	99.81	99.57	99,48	
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan KDH tentang Pemda	Jumlah Laporan Keuangan an Pemda	51	150,000.000.00	165,000.000.00	170,000.000.00	191,000.000.00	297,900.000.00	149,906,000.00	164,750,000.00	169,880,000.00	190,800,000.00	268,142,500.00	99.94	99.85	99.93	99.90	90.01	

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN | 2014

	Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA. Ke n-1																			
	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Pemda	51	110,000,000.00	110,000,000.00	113,500,000.00	150,000,000.00	150.000.000,00	110,000,000.00	105,184,000.00	113,145,000.00	148,101,250.00	147.250.125,00	100.00	100.00	95.62	99.69	98.73		
No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-					
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah SKPD yang terdampingi	51	372,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	135,000,000.00	140.000.000,00	372.000,000,00	120,000,000.00	119,980,800.00	134,988,900.00	139.983.300,00	100.00	100.00	99.98	99.99	99.99		

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN | 2014

Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan	Jumlah buku profil yang tersusun	500	133,010,000.00	183,010,000.00	233,610,000.00	291,860,000.00	368.920.000,00	117,910,000.00	171,910,000.00	223,610,000.00	291,550,000.00	336.420.000,00	88.65	93.93	95.72	99.89	82.18
	Jumlah media massa yang dipublikasikan	6															
Pembuatan Buku Pedoman Penatausahaan Tahun n+1	Jumlah Buku Pedoman Penatausahaan yang tersusun	51	75,000,000.00	75,000,000.00	87,500,000.00	75,000,000.00	75.000.000,00	75.000.000.00	75,000,000.00	25,000,000.00	87,300,000.00	74,950,000.00	74.825.000,00	100.00	33.33	99.77	99.93

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN | 2014

Penyusunan Standart Satuan Harga Tahun Anggaran n+1	Jumlah Buku Standart Satuan Harga yang tersusun	51	82,785,000.00	98,250,000.00	127,500,000.00	115,885,000.00	115.885.000,00	82,567,500.00	97,312,500.00	126,124,500.00	114,824,500.00	113.800.000,00	99.74	99.05	98.92	99.08	95.72
Pembuatan Papan Nama	Jumlah papan nama yang terpasang	100%		134,760,000.00	162,500,000.00	138,400,000.00	125.000.000,00	133,160,000.00	160,488,000.00	137,400,000.00	124.500.000,00		98.81	98.76	99.28	99.60	99.60

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset
Kabupaten Pamekasan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Rata-rata Pertumbuhan			
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PENDA PATAN DAERAH	649,918,098,774.77	732,197,672,061.23	923,078,187,303.78	968,628,848,671.64	1.199.763.351.402,53	662,701,089,241.32	761,599,027,167.15	946,548,107,933.45	998,841,483,156.46	1.219.849.024.308,55	103.96	101.97	104.02	102.54
Penda patan Asli Daerah	18,393,336,103.99	17,130,090,386.45	19,283,702,785.00	20,466,105,084.54	81.876.726.485,53	18,663,402,202.32	18,789,432,446.15	25,977,133,848.16	27,413,095,308.46	89.463.706.355,55	134.54	101.47	109.69	134.71
Hasil Pajak Daerah	6,120,277,500.00	6,360,322,000.00	7,494,885,000.00	9,142,706,378.43	10.551.510.250,00	6,785,681,907.00	7,163,695,026.00	9,561,284,396.10	11,630,845,325.42	13.136.666.891,44	138.81	110.87	112.63	127.57
Hasil Retribusi Daerah	1,486,400,000.00	1,580,920,000.00	1,636,720,000.00	1,616,200,000.00	17.912.919.300,00	1,683,841,979.07	1,744,796,602.07	1,870,999,121.24	2,095,076,251.01	19.020.284.066,04	107.16	113.28	110.37	114.31
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	902,037,953.99	1,145,277,055.45	2,229,327,005.00	2,190,408,777.11	1.676.769.958,72	902,037,953.99	1,145,277,055.45	2,229,327,005.00	2,190,408,788.29	1.709.430.958,72	106.54	100.00	100.00	100.00
Lain-Lain Penda patan Asli Daerah Yang Sah	9,884,620,650.00	8,043,571,331.00	7,922,770,780.00	7,516,789,929.00	51.735.526.976,18	9,291,840,362.26	8,735,663,762.63	12,315,523,325.82	11,496,764,943.74	55.597.324.438,45	140.06	94.00	108.60	155.44

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN | 2014

Dana Perimbangan	568,219,533,415.78	583,153,788,035.78	652,453,993,667.78	765,266,172,833.10	846.874.194.380,00	580,268,038,840.00	607,908,935,483.00	665,887,604,738.29	792,704,719,617.00	864.973.186.637,00	102.20	102.12	104.25	102.06
Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak	49,501,894,415.78	53,934,888,035.78	73,373,977,667.78	78,299,652,833.10		61,550,399,840.00	78,690,000,483.00	88,791,188,738.29	105,738,199,617.00		138.09	124.34	145.90	121.01
Dana Alokasi Umum	458,239,639,000.00	475,711,000,000.00	513,246,316,000.00	625,872,640,000.00	97.071.780.000,00	458,239,639,000.00	475,711,035,000.00	513,246,316,000.00	625,872,640,000.00	97.071.780.000,00	100.00	100.00	100.00	100.00
Dana Alokasi Khusus	60,478,000,000.00	53,507,900,000.00	65,833,700,000.00	61,093,880,000.00	97.071.780.000,00	60,478,000,000.00	53,507,900,000.00	63,850,100,000.00	61,093,880,000.00	97.071.780.000,00	100.00	100.00	100.00	96.99
Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Rata-rata Pertumbuhan			
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	63,305,229,255.00	131,913,793,639.00	251,340,490,851.00	182,896,570,754.00	52.914.775.000,00	63,769,648,199.00	134,900,659,238.00	254,683,369,347.00	178,723,668,231.00	47.910.315.000,00	100.73		102.26	101.33
Pendapatan Hibah				2,334,530,000.00	5.766.100.000,00				248,030,000.00	761.640.000,00				
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah lainnya	17,664,364,255.00	28,773,112,239.00	33,053,290,291.00	39,668,895,754.00	79.512.446.537,00	26,965,038,199.00	33,825,302,838.00	36,396,168,787.00	37,582,493,231.00	78.916.607.316,00	152.65		117.56	110.11
Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus	22,695,920,000.00	39,044,961,400.00	145,505,685,560.00	86,043,555,000.00	138.585.209.000,00	13,849,800,000.00	37,400,136,400.00	145,505,685,560.00	86,043,555,000.00	138.585.209.000,00	61.02		95.79	100.00

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN | 2014

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	22,944,945,000.00	64,095,720,000.00	72,781,515,000.00	54,849,590,000.00	47.148.675.000,00	22,954,810,000.00	63,675,220,000.00	72,781,515,000.00	54,849,590,000.00	47.148.675.000,00	100.04	99.34	100.00	
Bagi Hasil Cukai														
BELANJA DAERAH	96,483,765,587.81	132,719,671,983.95	134,185,472,614.53	135,681,112,419.22	1.322.879.723.920,50	87,490,364,321.40	124,848,652,599.00	125,085,202,945.00	125,637,919,795.54	1.167.571.677.040,03	90.68	94.07	93.22	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	90,491,714,387.81	124,868,335,683.95	122,884,384,514.53	115,400,331,044.22	770.097.454.906,50	82,035,826,650.40	117,959,760,219.00	115,964,879,891.00	108,080,278,535.54	706.544.975.907,33	90.66	94.47	94.37	
BELANJA PEGAWAI	11,761,044,280.20	12,632,492,008.55	13,880,964,939.13	14,406,169,418.82	674.299.378.580,10	11,292,592,265.40	11,937,820,759.00	12,512,394,792.00	13,630,929,239.10	622.191.084.311,33	96.02	94.50	90.14	
BELANJA BUNGA	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	2.041.850,00	34,444,950.00	26,344,146.00	18,243,400.00	10,164,801.44	2.041.838,00	57.41	43.91	30.41	
BELANJA HIBAH	20,206,785,000.00	34,219,144,600.00	35,023,930,500.00	46,171,921,550.00	15.566.275.000,00	19,202,827,000.00	33,425,304,435.00	32,878,458,171.00	43,014,657,550.00	12.789.468.750,00	95.03	97.68	93.87	
BELANJA BANTUAN SOSIAL	17,034,739,732.21	37,288,590,000.00	33,120,130,000.00	12,099,108,000.00	32.822.497.401,00	13,339,105,700.00	34,915,738,260.00	31,994,877,594.00	11,200,953,415.00	29.127.514.658,00	78.31	93.64	96.60	
Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Rata-rata Pertumbuhan			
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTA HAN DESA	2,288,343,098.40	2,288,343,098.40	2,288,343,098.40	2,288,343,098.40	2.288.343.098,40	1,780,000,000.00	1,780,000,000.00	1,780,000,000.00	1,780,000,000.00	1.780.000.000,00	77.79		77.79	77.79
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/	36,640,802,277.00	36,129,765,977.00	37,011,015,977.00	39,374,788,977.00	41.618.918.977,00	35,230,472,235.00	33,904,768,119.00	35,370,558,834.00	37,533,704,620.00	39.326.990.750,00	96.15		93.84	95.57

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN | 2014

KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAH DESA														
BELANJA TIDAK TERDUGA	2,500,000, 000.00	2,250,000, 000.00	1,500,000, 000.00	1,000,000, 000.00	3.5000.000. 000,00	1,156,384, 500.00	1,969,784, 500.00	1,410,347, 100.00	909,868, 910.00	1.327.875. 600,00	46.26		87.55	94.02
BELANJA LANG SUNG	5,992,051, 200.00	7,851,336, 300.00	11,301,088, 100.00	20,280,781, 375.00	552.782.269. 014,00	5,454,537, 671.00	5,634,592, 370.00	9,120,323, 054.00	17,557,641, 260.00	461.026.701. 132,70	91.03		71.77	80.70
BELANJA PEGAWAI	1,783,395, 000.00	1,620,680, 000.00	2,064,280, 000.00	2,518,810, 000.00	31.940.374. 800,00	1,610,833, 785.00	1,574,788, 948.00	1,868,635, 500.00	1,971,659, 500.00	27.984.031. 600,00	90.32		97.17	90.52
BELANJA BARANG DAN JASA	3,831,006, 200.00	4,916,756, 300.00	6,219,896, 100.00	15,894,552, 375.00	319.946.476. 738,00	3,493,988, 886.00	4,030,003, 427.00	5,749,346, 054.00	13,735,892, 742.00	286.950.811. 014,71	91.20		81.96	92.43
BELANJA MODAL	377,650, 000.00	1,313,900, 000.00	3,016,912, 000.00	1,867,419, 000.00	200.895.417. 476,00	349,715, 000.00	29,799, 995.00	1,502,341, 500.00	1,850,089, 018.00	146.091.858. 518,00	92.60		2.27	49.80
PEMBIA YAAN NETTO	86,697,847, 378.56	82,860,504, 247.03	131,188,070, 689.64	198,961,814, 691.31	123.116.372. 517,97	91,056,325, 412.11	84,470,076, 654.91	106,642,403, 214.33	201,759,778, 605.43	52.277.347. 268,52	105.03		101.94	81.29
Penerimaan Pembiayaan Daerah	98,995,106, 678.56	93,735,074, 047.03	147,546,070, 689.64	212,356,353, 691.31	157.407.250. 723,35	101,663,006, 678.55	94,669,770, 642.11	122,654,961, 139.64	212,777,276, 214.72	157.407.250. 323,35	102.69		101.00	83.13
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	98,995,106, 678.56	93,575,324, 047.03	120,246,070, 689.64	172,000,337, 046.31	157.242.822. 723,35	98,996,906, 678.55	92,298,216, 547.03	120,246,070, 689.64	172,000,337, 046.31	157.242.822. 723,35	100.00		98.64	0.00
Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Rata-rata Pertumbuhan			
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN | 2014

Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	25,000,000,000.00	40,220,742,645.00	0,00	-0,00	2,211,804,095.08	0,00	40,570,460,563.49	0,00	0	00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	00	0
Penerimaan Kembali Investasi	0,00	159,750,000.00	2,300,000,000.00	135,274,000.00	0,00	2,666,100,000.00	159,750,000.00	2,408,890,450.00	206,478,604.92	164.427.600,00		100.00	104.73
Penerimaan Dana Titipan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	00	0
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10,874,569,800.00	16,358,000,000.00	13,394,539,000.00	11,017,497,609.29	34.126.450.205,38	10,606,681,266.44	10,199,693,987.20	16,012,557,925.31	11,017,497,609.29	0,00	86.25	93.79	97.89
Pembentukan Dana Cadangan	7,600,000,000.00	8,640,000,000.00	13,640,000,000.00	3,000,000,000.00	5.000.000.000,00	7,216,243,466.44	9,271,945,687.20	14,294,559,625.31	4,516,284,386.54	0,00	94.95	107.31	104.80
Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah	4,629,259,300.00	2,006,819,800.00	2,650,000,000.00	10,242,750,000.00	29.092.451.055,30	3,322,439,500.00	700,000,000.00	1,650,000,000.00	6,349,425,922.75	10.788.550.975,00	71.77	34.88	62.26
Pembayaran Pokok Utang	68,000,000.00	68,000,000.00	68,000,000.00	151,789,000.00	33.999.150,00	67,998,300.00	67,998,300.00	67,998,300.00	151,787,300.00	33.999.150,00	100.00	100.00	100.00
Pembayaran Dana Titipan	0,00	159,750,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,750,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.00

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 16 ayat 3 bahwa "*pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah*" sedangkan belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja.

Sedangkan target yang ditetapkan dalam APBD tahun 2009-2013 sebagaimana tertera pada tabel 2.3.2 tersebut sudah menggambarkan potensi yang sebenarnya, karena tahapan dari mulai pendataan, perhitungan, penerbitan SKPD, SKRD dilakukan berdasarkan sistem prosedur yang telah ditetapkan. Disisi lain untuk dana perimbangan saat menentukan target, terlebih dahulu dikonsultasikan ke pemerintah pusat ataupun ke propinsi Jawa Timur.

Target anggaran pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan selama 5 tahun terakhir, baik secara absolut maupun relatif cenderung mengalami peningkatan seperti terlihat dari tabel 2.2.3 terlampir.

Evaluasi pencapaian terget selama 5 (lima) tahun disampaikan untuk memberikan gambaran bahwa "*Berdasarkan tabel terlampir secara signifikan, relisasi dari Pos Pendapatan Asli Daerah dari Tahun ke tahun realisasi jauh melebihi target yang telah ditetapkan*" hal tersebut telah menggambarkan tentang pencapaian misi BPKA tahun 2009-2013 yang meliputi :

- a. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Agama diiringi dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Mendorong pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif.

- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia/petugas pengelola pendapatan daerah.
- d. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.
- e. Mengkoordinir pengelolaan APBD secara optimal bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- f. Mengamankan dan memanfaatkan asset daerah melalui system pengelolaan yang efisien.
- g. Mewujudkan pemerintahan yang good governance sesuai dengan aspirasi daerah.

Dengan adanya beberapa perubahan kondisi masyarakat dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Pamekasan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset harus menyesuaikan visinya untuk tahun 2014-2018 yang lebih menantang, berorientasi pada kepentingan masyarakat, bersifat jangka panjang, memberikan kekuatan dan mengilhami, berorientasi pada perubahan-perubahan dan masa depan yang diharapkan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Adapun tantangan pelayanan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset pada saat ini antara lain:

1. Bagaimana meningkatkan sarana dan prasarana representatif untuk memberikan pelayanan publik/masyarakat dalam rangka mensejahterakan masyarakat;
2. Penetapan APBD yang tepat waktu;
3. Penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan auditable untuk mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK;
4. Peningkatan Pemanfaatan dan Pengamanan asset daerah;
5. Memberikan kepuasan dalam hal keterbukaan informasi terutama tentang pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Pamekasan terhadap seluruh lapisan masyarakat, yang kini mulai peka terhadap segala isu-isu pemerintahan.

Adapun peluang pelayanan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset pada saat ini antara lain:

1. Tercapainya kepuasan masyarakat terhadap informasi terutama tentang APBD Pemerintah Kabupaten Pamekasan karena di dalam setiap penetapan APBD, Perubahan APBD serta Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD selalu diinformasikan melalui media cetak (beberapa surat kabar) dan media elektronik (website BPKA).
2. Terlaksananya kegiatan APBD secara cepat khususnya dalam proses penerbitan SP2D dalam rangka pembayaran kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga.

BAB III

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Tabel 3.1.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset
Kabupaten Pamekasan

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal	Eksternal	
			(Kewenangan SKPD)	(Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan daerah :					
a. Penyusunan APBD tepat waktu	Penetapan APBD tidak tepat waktu	Penetapan APBD tepat waktu	Penyampaian Rancangan Perda APBD ke DPRD harus tepat waktu	Jadwal pembahasan dan penetapan ditentukan oleh DPRD	Pembahasan oleh DPRD memakan waktu lama, sehingga penetapan tidak tepat waktu
b. Penyusunan Laporan Keuangan	Mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian	Opini Wajar Tanpa Pengecualian	a. Penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	a. Penyalahgunaan pengelolaan anggaran yang material oleh oknum tertentu	Penyalahgunaan pengelolaan anggaran yang

akuntable dan auditable		dari BPK RI	b. Penganggaran yang tepat	b. Perbedaan belanja antara anggaran dengan bukti realisasi anggaran	material oleh oknum tertentu
2. Peningkatan sistem dan sarana pengamanan asset daerah	Masih banyaknya asset yang belum aman dari sisi penguasaan fisik dan administrasi	Semua asset harus dikuasai secara fisik dan ada bukti kepemilikan	c. Penyampaian Laporan Keuangan SKPD harus tepat waktu Pengurusan sertifikan	c. Tidak ada bukti realisasi belanja yang nilainya material Lambatnya proses penerbitan sertifikat	Adanya sarana pengamanan asset yang rusak karena alam ataupun manusia.
3. Meningkatkan kualitas dan Sumber Daya Manusia	Beberapa pegawai telah mengikuti pelatihan, diklat ataupun kursus	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan, diklat ataupun kursus	Mengikutkan pegawainya untuk ikut pelatihan, diklat dan kursus	Kesadaran pegawai untuk meningkatkan kualitas kinerjanya	Adanya pegawai yang tidak mau meningkatkan kualitas kinerjanya

Selanjutnya analisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset dari faktor-faktor eksternal lainnya berdasar tabel berikut:

Tabel 3.1.2
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1	2	3	4	5
1	Banyaknya negara di dunia yang mengalami inflasi	Nilai Rupiah yang tidak stabil	pelaksanaan pilgub maupun pilkada di jatim	Pertumbuhan ekonomi Jatim diatas rata nasioal
2	Globalisasi	Kenaikan BBM dan harga bahan pokok	Jawa Timur menolak impor untuk holtikultura	Gagalnya panen bagi petani tembakau di madura
3	Masuknya barang impor antar negara tanpa dikenakan pajak masuk impor	Suasana politik menjelang Pilpres tahun 2014	Laju pertumbuhan ekonomi yang cukup lambat	Inflasi yang cenderung tidak stabilo
4	Good Governance dan Clean	Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	Tuntutan masyarakat terhadap	Opini laporan keuangan dengan Wajar Tanpa

	Government		pengelolaan yang Transparan, akuntabel dan auditable	Pengecualian
--	------------	--	---	--------------

2.2 Telaahan, Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi BPKA yang terkait visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Tabel 3.2.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi	Terwujudnya Pamekasan yang Bersih, Sehat, Cerdas, dan Sejahtera, Berlandaskan Iman dan Taqwa didukung Aparat yang Profesional			
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi 5			
	Melakukan percepatan reformasi birokrasi di segala bidang, dan tata kelola pemerintahan yang baik (transparan dan akuntabel)			
	Program :			

	Peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur	Seringnya terjadi mutasi pegawai	untuk pegawai yang dimutasi perlu waktu belajar lagi agar dapat menyesuaikan dengan pekerjaan barunya	SDM yang berkualitas
	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Dibutuhkan peraturan keuangan daerah sesuai dengan peraturan pemerintah yang sering berubah cepat	Pembahasan yang lama di DPRD	Tersusunnya Perda tentang pengelolaan keuangan
	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Opini laporan keuangan yang masih Wajar Dengan Pengecualian	peraturan terkait pengelolaan keuangan yang sering berubah-ubah	Pengelolaan keuangan yang terkomputerisasi

2.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Tabel 3.3.1

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran renstra	30
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	20
No	Kriteria	Bobot
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap publik	20
4	Merupakan isu yang menjadi perhatian pemerintah propinsi maupun pusat	20
5	Merupakan isu yang kondisinya permasalahannya dirasa mendesak	10
Jumlah		100

Tabel 3.3.2

Penilaian Isu strategis terhadap kriteria yang ditetapkan

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-					Total Skor
		1	2	3	4	5	
1	Lemahnya SDM di bidang keuangan daerah, sehingga kurang inovasi dan lemah dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ataupun peraturan yang baru.	6	9	4	1	7	27
2	Ketergantungan keuangan daerah pada pembiayaan dari pusat masih relatif tinggi, hal ini dapat berpengaruh pada penyusunan	9	6	7	9	6	37

	anggaran						
3	Kualifikasi SDM yang tidak sesuai dengan kebutuhan bidang keuangan dan asset (Kurangnya tenaga akuntan dan apraisal)	8	5	8	5	5	31
4	Opini atas laporan keuangan yang masih Wajar Dengan Pengecualian.	8	8	7	6	7	36

Tabel 3.3.3
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No.	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ketergantungan keuangan daerah pada pembiayaan dari pusat masih relatif tinggi, hal ini dapat berpengaruh pada penyusunan anggaran pembangunan daerah.	37	7.4
2	Opini atas laporan keuangan yang masih Wajar Dengan Pengecualian.	36	7.2
3	Kualifikasi SDM yang tidak sesuai dengan kebutuhan bidang keuangan dan asset (Kurangnya tenaga akuntan dan apraisal)	31	6.2
4	Lemahnya SDM di bidang keuangan daerah, sehingga kurang inovasi dan lemah dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ataupun peraturan yang baru.	27	5.4

Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan urutan prioritas perhatian terhadap isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Pamekasan adalah sebagai berikut:

1. Ketergantungan keuangan daerah pada pembiayaan dari pusat masih relatif tinggi, hal ini dapat berpengaruh pada penyusunan anggaran pembangunan daerah;
2. Opini atas laporan keuangan yang masih Wajar Dengan Pengecualian;
3. Kualifikasi SDM yang tidak sesuai dengan kebutuhan bidang keuangan dan asset;
4. Lemahnya SDM di bidang keuangan daerah, sehingga kurang inovasi dan lemah dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ataupun peraturan yang baru.

BAB IV

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

4.1 Visi dan Misi BPKA

4.1.1 Visi

Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan tidak dapat lepas dari ruang lingkup “Visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan”, karena Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset merupakan Perangkat Daerah di Bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset dan juga merupakan elemen penting di dalam suksesnya pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan tersebut. Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset yang ditetapkan adalah “ **Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang Efisien, Efektif, Transparan dan Akuntabel**”.

Kata kunci dari Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan tidak lain:

1. Terwujudnya adalah tercapainya keadaan yang diinginkan.
2. Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang Efisien, Efektif, Transparan dan Akuntabel

Pengelolaan Keuangan dan Asset harus tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan auditable serta dikelola oleh Aparatur yang Kompeten dan Profesional sesuai dengan bidangnya yang diharapkan dapat menyokong kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sedangkan Visi dapat berjalan sesuai dengan harapan apabila seluruh rangkaian dari Misi, Program, Kebijakan, Tujuan dan Sasaran dapat berjalan secara kongkrit dan mendukung sesuai tahapan-tahapan Rencana Strategis.

4.1.2 Misi

Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut :

- 1 Meningkatkan Kualitas Administrasi Tata Kelola Keuangan dan Asset Daerah Yang Tertib, Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel dan Auditabel;
- 2 Meningkatkan kualitas dan kapabilitas personil Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset;
- 3 Mengamankan dan memanfaatkan asset daerah melalui sistem pengelolaan yang efisien dan efektif.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKA

4.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dan pencapaian target-target ini merupakan ukuran keberhasilan kinerja suatu organisasi. Berdasarkan hal yang berpangkal Kepada Visi, Misi dan faktor-faktor penentu keberhasilan yang telah digariskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan dengan menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan asset daerah;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola keuangan.

4.2.2. Sasaran Jangka Menengah BPKA

Dalam upaya untuk mencapai tujuan, ditetapkan sasaran pelaksanaan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan asset daerah;
3. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia pengelola keuangan.

4.3 Strategi dan Kebijakan

4.3.1. Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program. Program kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan tidak lepas dari Prioritas pembangunan Kabupaten Pamekasan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan yang diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
2. Peningkatan kualitas pengelolaan Asset daerah secara optimal.
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola keuangan.

Strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan dirumuskan dalam kerangka Balance Score Card (BSC). Rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan 2013-2018 menunjukkan bahwa agar BPKA berhasil mencapai visinya yaitu “ **Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang Efisien, Efektif, Transparan dan Akuntabel**”.

Inisiatif-inisiatif strategi atau kebijakan umum dalam perspektif ini diantaranya adalah peningkatan kompetensi dan produktifitas SDM aparatur, budaya yang transparan dan akuntabel, serta dukungan sarana dan prasarana fisik maupun non fisik yang memadai. Perspektif ini fokus pada penciptaan nilai bagi pelanggan (masyarakat) secara efektif dan efisien. Kebijakan umum dalam perspektif adalah optimalisasi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

4.3.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang ditentukan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun sesuai dengan pengaturan pelaksanaan dan diharapkan bisa mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi Dan Arah Kebijakan BPKA Kabupaten Pamekasan**Tabel 4**

Visi : "Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Efisien, Efektif, Transparan dan Akuntabel".			
Misi I : Meningkatkan Kualitas Administrasi Tata Kelola Keuangan dan Asset Daerah Yang Tertib, Efektif, Efisien, Transparan, akuntabel dan auditabel.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	
		Kebijakan	Program
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan tertib administrasi perkantoran b. Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai c. Meningkatkan tertib administrasi keuangan daerah d. Untuk memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari hasil audit BPK e. Keterbukaan informasi tentang APBD bagi publik 	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendukung pelayanan administrasi perkantoran b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur c. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah d. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Misi 2 : Mengamankan dan memanfaatkan asset daerah melalui sistem pengelolaan yang efisien dan Efektif.

Tujuan	Sasaran	Strategi	
		Kebijakan	Program
Meningkatkan kualitas pengelolaan Asset Daerah	Ketersediaan Sarana pengamanan asset daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan daerah secara optimal	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Misi 3 : Meningkatkan kualitas dan kapabilitas personil Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset.

Tujuan	Sasaran	Strategi	
		Kebijakan	Program
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola keuangan	Meningkatnya Disiplin, Etos Kerja dan Kualitas SDM	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola keuangan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

BAB V**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Rencana Program dan Kegiatan Dengan Kerangka Pendanaan Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan lima tahun kedepan diharapkan adanya perubahan kebijakan yang sangat mendasar sehingga berpengaruh positif terhadap pelaksanaan Program Kegiatan tahun-tahun berikutnya.

Program Pembangunan Rencana Strategis mengacu ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir telah diubah dengan Permendagri no. 59 tahun 2007 dimana struktur belanja secara runtut dimulai dari urusan organisasi, belanja tidak langsung (meliputi : jenis, obyek dan rincian obyek belanja) dan belanja langsung (meliputi : jenis, obyek, dan rincian obyek belanja). Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan menetapkan program utama sebagai berikut:

- Program Pendukung Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Program Peningkatan Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan 5 (lima) tahun ke depan 2014-2018 telah tersusun sebagai berikut :

Tabel 5
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan
Indikator SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD	Lokasi
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1.	Me nin gka tka n kua li	Lap ora n yan g dise lesa ika		Prog ram Pela yana n adm inist rasi																		

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN | 2014

tas pen gel ola an keu ang an dae rah	min istr asi per kan tor an	n tep at wa ktu	Perk anto ran	Pend Terse ukun diany g Pelay baran Admi nistrasi Perk antor an	Terse diany a bara ng dan jasa admi nistrasi keua ngan	8 0 %	8,052,32 5,000.00	8 0 %	8,052,32 5,000.00	8 0 %	8,052,325 ,000.00	8 0 %	8,060,00 0,000.00	8 0 %	8,060,000 ,000.00	8 0 %	8,060,00 0,000.00	BPK A	K a b. P a m ek as a n
			Rapa t- rapat koor dinas i dan kons ultasi	Terse diany a biaya perja lanan dinas	8 0 %	250,000, 000.00	8 0 %	250,000, 000.00	8 0 %	250,000,0 00.00	8 0 %	250,000, 000.00	8 0 %	250,000,0 00.00	8 0 %	250,000, 000.00			

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN | 2014

		ke luar daer ah																	
		Pere nca an moni torin g dan Evalu asi	Terse diany a jasa peng elola an keua ngan	270,087,0 00.00	8 0 %	301,867, 000.00	8 0 %	301,867, 000.00	8 0 %	301,867,0 00.00	8 0 %	301,867, 000.00	8 0 %	301,867,0 00.00	8 0 %	301,867, 000.00	8 0 %	301,867, 000.00	8 0 %
Ket ers edi aan sar ana dan pra	Ter sedi any a sar ana dan pra	Prog ram peni ngk atan sara na dan																	

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN | 2014

sar ana apa rat ur yan g me ma dai	sar ana apa rat ur yan g me ma dai/ me nuh i sya rat	pras aran a apar atur	Peme lihara an rutin/ berk ala n kend araa /oper asion al dinas /oper asion al	Terp enuhi nya kend araa n dinas /oper asion al yang layak	143,822,0 00.00	8 0 %	189,979, 000.00	8 0 %	189,979, 000.00	8 0 %	189,979,0 00.00	8 0 %	189,979, 000.00	8 0 %	189,979,0 00.00	8 0 %	189,979, 000.00		
Tuj ua n	Sas ara n	Ind ika tor sas	k o d e	Prog ram dan Kegi	Indi kato r Kine	Data Capaian pada Tahun	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Kondisi Kinerja pada akhir periode	SK PD	L o k a					

		a r a n		a t a n	r j a P r o g r a m (O u t c o m e) d a n K e g i a t a n (O u t p u t)	A w a l P e r e n c a n a n											R e n s t r a S K P D			s i	
1	2	3	4	5	6	7		1 0	R p. 11	1 2	R p. 13	1 4	R p. 15	1 6	R p. 17	1 8	R p. 19	2 0	R p. 21	22	2 3
				P e m e l i h a r a n r u t i n/ b e r k a l a G e d u n g K a n t	T e r p e n u h i s a r a n g e d u n g k a n t o r	3 9 4,2 7 5,0 0 0.00		8 0 %	6 0 0,7 0 0.00	8 0 %	6 0 0,7 0 0.00	8 0 %	6 0 0,7 0 0.00	8 0 %	6 0 0,7 0 0.00	8 0 %	6 0 0,7 0 0.00	8 0 %	6 0 0,7 0 0.00		

or dan Rumah Dinas
Pemerintahan rutin/berkala
Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas

Terpenuhi
nya peralatan gedung kantor

42,500,00
0.00

8
5
%

41,490,0
00.00

8
5
%

41,490,0
00.00

8
5
%

41,490,0
00.00

8
5
%

41,490,0
00.00

8
5
%

41,490,0
00.00

8
5
%

41,490,0
00.00

8
5
%

41,490,0
00.00

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN | 2014

Me nin gka tny a tert ib ad min istr asi keu	Lap ora n yan g dise lesa ika n tep at wa	Peme lihara an Rutin /berk ala Gedu ng ng Pasar Daer ah Prog ram Peni ngk atan dan Pen gem ban gan Pen gelol	Terp enuhi nya saran a gedu ng pasar daer ah	356,900,0 00.00	8	283,000,	8	283,000,	8	283,000,0	8	283,000,	8	283,000,0	8	283,000,
					5	000.00	5	000.00	5	00.00	5	000.00	5	00.00	5	000.00
					%		%		%		%		%		%	

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN | 2014

ang an dae rah	ktu	aan Keu ang an Daer ah																
		Peny usun an ranca ngan perat uran KDH tenta ng Penja bara n Peru baha n APBD	Juml ah Doku men Ranc anga n Perat uran KDH yang tersu sun	359,695,0 00.00	1 7 5 b u k u	367,375, 000.00	1 7 5 b u k u	367,375, 000.00	1 7 5 b u k u	367,375,0 00.00	1 7 5 b u k u	367,375, 000.00	1 7 5 b u k u	367,375,0 00.00	1 7 5 b u k u	367,375, 000.00	1 7 5 b u k u	367,375, 000.00

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD	Lokasi
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN | 2014

Penyusunan anggaran perat uran KDH tenta ng Penja bara n APBD 2014	Jumlah	485,000,000.00	175buku	175buku	175buku	175buku	175buku	175buku	175buku	175buku	175buku	175buku	175buku
Penyusunan anggaran perat uran Pem	Jumlah	268,142,500.00	125buku	125buku	125buku	125buku	125buku	125buku	125buku	125buku	125buku	125buku	125buku

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN | 2014

KDH
da
tenta
ng
penja
bara
n
perta
nggu
ngja
waba
n
pelak
sana
an
APBD

Peny
usun
an
Lapo
ran
Reali
sasi

da
Juml
ah
Lapo
ran
Reali
sasi
Angg

148,101,2
50.00

k
u
0
0
b
u
k

150,000,
000.00

k
u
0
0
b
u
k

150,000,
000.00

k
u
0
0
b
u
k

155,000,0
00.00

k
u
0
0
b
u
k

155,000,
000.00

k
u
0
0
b
u
k

155,000,0
00.00

k
u
0
0
b
u
k

155,000,
000.00

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN | 2014

	Anggaran dan Capaian Kinerja	Anggaran Pemda		u	u	u	u	u	u	u	u	u	u	u
	Pengelolaan dan Pengendalian dan asset	Tersebut data aset yang akurat	369,098,700.00	90%	415,875,000.00	90%	415,875,000.00	90%	415,875,000.00	90%	415,875,000.00	90%	415,875,000.00	90%
Terciptanya	Pembuatan Buku Pedo	Jumlah Buku Pedo	74,950,000.00	150b	75,000,000.00	150b	75,000,000.00	150b	75,000,000.00	150b	75,000,000.00	150b	75,000,000.00	150b

		sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik		Pedoman Penataan Keuangan Tahun 2013	manajemen yang tersusun			u k u	u k u	u k u	u k u	u k u	u k u		
Tujan	Sasaran	Indikator	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	SKPD	Lokasi	
						Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018					

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN | 2014

					(Out com e) dan Kegi atan (Out put)				T ar g et Rp.	T ar g et Rp.	T ar g et Rp.	T ar g et Rp.	T ar g et Rp.	T ar g et Rp.	T ar g et Rp.	T ar g et Rp.		
1	2	3	4	5	6	7			1 0 11	1 2 13	1 4 15	1 6 17	1 8 19	2 0 21	2 2 23			
				Pem buat an Buku Pedo man Peny usun an RKA 2014	Juml ah Buku Pedo man Peny usun an RKA yang tersu sun	79,850,00 0.00			1 5 0 b u k u	1 5 0 b u k u	1 5 0 b u k u	1 5 0 b u k u	1 5 0 b u k u	1 5 0 b u k u	1 5 0 b u k u			

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN | 2014

Penyusunan Standar Sertifikat Satuan Harga Tahun Anggaran 2014	Jumlah Buku Standar Sertifikat Satuan Harga yang tersusun	114,824,500.00	100	115,885,000.00	100	115,885,000.00	100	115,885,000.00	100	115,885,000.00	100	115,885,000.00	100	115,885,000.00	100
Program Peningkatan Peraturan Per															

**nda
ng-
und
ang
an**

Pem
buat
an
Regu
lasi
Pend
ukun
g
Peng
elola
an
Keua
ngan
Daer
ah

Juml
ah
Perat
uran
yang
tersu
sun

105,000,0
00.00

1
p
er
at
ur
a
n

145,000,
000.00

1
p
er
at
ur
a
n

145,000,
000.00

1
p
er
at
ur
a
n

145,000,0
00.00

1
p
er
at
ur
a
n

145,000,
000.00

1
p
er
at
ur
a
n

145,000,0
00.00

1
p
er
at
ur
a
n

145,000,
000.00

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN | 2014

Unt	Lap	Pend	Juml				140,000,		140,000,		150,000,0		150,000,		150,000,0		150,000,
uk	ora	ampi	ah	134,988,9			000.00	5	000.00	5	00.00	5	000.00	5	00.00	5	000.00
me	n	ngan	SKPD	00.00				2		2		2		2		2	
mp	keu	Peny	yang					S	S	S		S	S	S		S	S
erol	ang	usun	terda					K	K	K		K	K	K		K	K
eh	an	an	mpin					P	P	P		P	P	P		P	P
Opi	yan	Lapo	gi					D	D	D		D	D	D		D	D
ni	g	ran															
Waj	tra	Keua															
ar	nsp	ngan															
Tan	ara	SKPD															
pa	n																
Pen	dan																
gec	aud																
uali	itab																
an	el																
dari																	
has																	
il																	
aud																	
it																	
BPK			Opni					W		W		W		W		W	

					Audit BPK			T P		T P		T P		T P		T P				
Tujuan	Sasaran	Indikator	sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD	Lokasi	
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							T ar g e t	Rp.	T ar g e t	Rp.	T ar g e t	Rp.	T ar g e t	Rp.	T ar g e t	Rp.	T ar g e t			Rp.

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN | 2014

1	2	3	4	5	6	7			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Ket erb uka an info rma si tent ang APB D bag i pub lik	Ter sedi any a Inf orm asi tent ang APB D bag i pub lik		Publi kasi Peng elola an Keua ngan Daer ah Kabu pate n Pame kasa n	Juml ah medi a mass a	291,550,0 00.00			5 0 0 b u k u	368,920, 000.00	5 0 0 b u k u	368,920, 000.00	5 0 0 b u k u	368,920,0 00.00	5 0 0 b u k u	368,920, 000.00	5 0 0 b u k u	368,920,0 00.00	5 0 0 b u k u	368,920, 000.00		
					Juml ah medi a mass a			6 m e di a m			6 m e di a m			6 m e di a m			6 m e di a m			6 m e di a m		

				yang mem publi kasik an				as sa		as sa		as sa		as sa				
2. Me nin gka tka n kua lita s Sist em dan sar ana pen ga	ket ers edi aan sar ana pen ga ma nan ass et dae rah	ter pen uhi nya kua lita s pen ga ma nan ass et dae rah	Prog ram Peni ngk atan dan Pen gem ban gan Pen gelol aan Keu ang an															

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN | 2014

ma nan ass et dae rah		Daer ah															
		Peng aman an Asset	Juml ah Paga r yang terba ngun	312,532,0 18.00		4 p a g ar	315,000, 000.00	4 p a g ar	315,000, 000.00	4 p a g ar	315,000,0 00.00	4 p a g ar	320,000, 000.00	4 p a g ar	320,000,0 00.00	4 p a g ar	320,000, 000.00
		Pem buat an dan Pema sang an Papa n	Juml ah Papa n Nam a yang terpa sang	137,400,0 00.00		1 0 0 p a p a n	125,000, 000.00	1 0 0 p a p a n	125,000, 000.00	1 0 0 p a p a n	125,000,0 00.00	1 0 0 p a p a n	130,000, 000.00	1 0 0 p a p a n	130,000,0 00.00	1 0 0 p a p a n	130,000, 000.00

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN | 2014

				Nam a																
3.	Me nin gka tka n kua lita s dan Su mb er Day a Ma nus ia	Ter cipt any a SD M yan g ber kua lita s dan kua lita s SD M		Prog ram Peni ngk atan Kap asita s Sum ber Day a Apar atur																
				Pendi dikan dan	Juml ah Pega	174,841,7 00.00			1 0	175,000, 000.00	1 0	175,000, 000.00	1 0	175,000,0 00.00	1 0	185,000, 000.00	1 0	185,000,0 00.00	1 0	185,000, 000.00

				pelati han form al	wai yang men gikuti pelati han				8 p e g a w ai		8 p e g a w ai		8 p e g a w ai		8 p e g a w ai		8 p e g a w ai			
--	--	--	--	-----------------------------	---	--	--	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	--	--

BAB VI**INDIKATOR KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Penetapan indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan adalah untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran startegis yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Pamekasan tahun 2013 - 2017 dengan indikator kinerja, antara lain :

1. Prosentase SKPD yang menyusun RKA/RKPA dan DPA/DPPA tepat waktu dan sesuai pedoman.
2. Prosentase penerbitan SP2D tepat waktu sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar.
3. Prosentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu.
4. Prosentase asset tetap tanah yang bersertifikat.
5. Nilai asset daerah.
6. Prosentase pengelola keuangan yang bersertifikat.

BAB VII

PENUTUP

Rencana strategis SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan 2013-2018 merupakan serangkaian tindakan yang disusun dengan melibatkan seluruh jajaran organisasi dengan harapan bahwa Rencana Strategis ini dapat diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi

Seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam Renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian visi Kabupaten Pamekasan. Dengan telah disepakati Renstra ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan konsolidasi ke dalam sehingga timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas masing-masing. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan harus dapat meningkatkan komunikasi baik vertical maupun horizontal antar perangkat daerah dengan harapan bahwa arus informasi yang diterima merupakan salah satu aspek penentu keberhasilan / kegagalan pelaksanaan visi dan misi.

Rencana strategis yang telah disusun diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan timbul dikemudian hari, oleh Karena itu komitmen diantara semua jajaran harus dijunjung tinggi sehingga tujuan akhir dalam rangka mendukung masyarakat Kabupaten Pamekasan yang lebih cerdas, sehat, dan sejahtera dapat tercapai.

Pamekasan, Januari 2014

K E P A L A

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset
Kab. Pamekasan

Ttd

Drs. TAUFIKURRACHMAN. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680630 199303 1 005

DAFTAR ISI

Bab I	: Pendahuluan.....	1
	1	
	a. Latar Belakang.....	1
	b. Landasan Hukum.....	2
	c. Maksud dan Tujuan.....	4
	d. Sistematika Penulisan.....	4
Bab II	: Gambaran Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset.....	6
	6	
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPKA.....	6
	2.2 Sumber Daya BPKA.....	12
	2.3 Kinerja Pelayanan BPKA.....	14
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKA.....	23
Bab III	: Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	24
	24	
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKA.....	24
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	26

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis.....	27
Bab IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	29
4.1 Visi dan Misi BPKA.....	29
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKA.....	29
4.3 Strategi dan Kebijakan.....	30
Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.....	33
Bab VI : Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	39
Bab VII : Penutup	41